

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia memiliki 17.504 pulau dan sekitar 6.000 diantaranya tidak berpenduduk tetap. Pulau Jawa merupakan pulau yang paling padat penduduknya. Hampir 65% populasi penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa. Secara geografis keadaan Pulau Jawa adalah barisan penguungan dan hutan tropik. Berdasarkan pembagian wilayah administratif, Pulau Jawa dibagi dalam 6 daerah administratif. Antara lain Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta), Provinsi Jawa barat, Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Jawa Timur.

Luas Pulau Jawa adalah 126.700 km². Berdasarkan hasil sensus tahun 2010, banyak penduduk Pulau Jawa sekitar 130 juta jiwa. Hampir dari setengah penduduk Indonesia (230 juta jiwa) berada di Pulau Jawa. Kepadatan penduduk Pulau Jawa menyebabkan berbagai permasalahan sosial dan ekonomi. Salah satu permasalahan tersebut adalah ketimpangan dan ketidak-merataan dalam distribusi pendapatan.

Pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi Indonesia masih didominasi oleh provinsi – provinsi di Pulau Jawa. Menurut data BPS, pada tahun lalu Pulau Jawa memberikan kontribusi dalam PDB sebesar 57,63% dari pertumbuhan Indonesia. Meningkat sebesar 0,04% dibandingkan tahun sebelumnya. Provinsi-provinsi

yang menjadi penyumbang terbesar adalah DKI Jakarta (16,76%), Jawa Timur (14,89), dan Jawa Barat.(13,31%).

Pendapatan perkapita penduduk Pulau Jawa secara umum sama dengan pendapatan perkapita penduduk Indonesia pada umumnya. Namun terdapat perbedaan sangat signifikan terjadi pada DKI Jakarta dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya.

Pendapatan perkapita adalah besarnya pertumbuhan ekonomi dibagi dengan banyaknya penduduk pada daerah tersebut. Pendapatan perkapita secara tidak langsung dapat menggambarkan keadaan kesejahteraan penduduk suatu daerah. Besarnya pendapatan perkapita tidak berarti jika terdapat ketimpangan dalam pendistribusiannya.

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak akan berarti jika hasil pertumbuhan tersebut hanya dikuasai oleh sebagian kecil penduduk saja. Artinya terjadi ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Ketimpangan tersebut akan membawa dampak langsung maupun tidak langsung terhadap disharmonisasi sosial. Seperti terjadinya masalah-masalah sosial dasar, kesehatan, pemukiman kumuh, kesenjangan, pengangguran dan kriminalitas.

Distribusi pendapatan dapat diukur dengan indeks gini. Indeks gini menggambarkan merata atau tidaknya distribusi pendapatan suatu daerah. Jika nilai indeks gini mendekati satu, maka distribusi pendapatan digolongkan timpang. Sebaliknya jika indeks gini mendekati nol, maka distribusi pendapatan pada suatu daerah adalah merata.

Berdasarkan data badan pusat statistik, selama tahun 2007-2012 terjadi peningkatan laju indeks gini pada setiap provinsi di Pulau Jawa. Ketimpangan pendapatan provinsi-provinsi di Jawa berada dalam ketimpangan sedang. Namun secara serentak ketimpangan mulai menuju pada ketimpangan tinggi. Kecuali provinsi Jawa timur yang tetap berada dalam ketimpangan sedang.

Peran pemerintah dalam mengurangi ketimpangan dalam distribusi pendapatan sangat penting. Seperti pajak, kesehatan, dan jaminan sosial lainnya. Namun demikian, kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah tidak berarti jika masyarakat hanya diam atau pasif terhadap kebijakan tersebut. Masyarakat harus berperan aktif dalam mendukung kebijakan tersebut.

Pendidikan merupakan faktor penting dalam pembangunan suatu negara. Terdapat banyak indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat pendidikan penduduk. Indikator tersebut antara lain adalah angka partisipasi sekolah, rata-rata lama sekolah, dan angka melek huruf. Namun demikian, tidak semua indikator tersebut disediakan secara lengkap oleh lembaga-lembaga statistik.

Angka partisipasi kasar menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang menempuh pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Angka partisipasi kasar digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Oleh karena itu, angka partisipasi kasar seharusnya melebihi 100%. Hal ini disebabkan jumlah murid yang bersekolah

pada suatu jenjang pendidikan meliputi usia di atas usia masuk sekolah pada tiap jenjang pendidikan tersebut.

Rata-rata lama sekolah penduduk pada provinsi-provinsi di Pulau Jawa berada pada jenjang pendidikan SMP. Namun berdasarkan perbandingan grafik angka partisipasi kasar tiap provinsi, keberhasilan program pendidikan yang dilakukan oleh enam provinsi di Pulau Jawa adalah pada taraf Sekolah Dasar. Kecuali provinsi DI Yogyakarta memiliki tingkat keberhasilan program pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan lima provinsi lainnya, yaitu pada jenjang pendidikan SMP dan SMA.

Pendidikan merupakan sebuah akses untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu daerah. Jika suatu daerah dinyatakan memiliki tingkat pendidikan yang tinggi atau semakin banyak populasi yang berpendidikan pada daerah tersebut. Hal ini akan berdampak pada semakin banyaknya tenaga kerja dengan tingkat pendidikan yang tinggi. Hal tersebut pada jangka pendek akan menyebabkan ketimpangan. Namun dalam jangka panjang ketimpangan tersebut akan berkurang atau terjadinya pemerataan dalam distribusi pendapatan, dikarenakan meningkatnya populasi penduduk yang berpendidikan. Oleh karena itu, peran pemerintah dan kesadaran masyarakat dalam hal pendidikan sangat dibutuhkan.

Banyaknya populasi yang berpendidikan tidak akan berguna jika tidak ada lapangan kerja yang dapat menyerapnya. Sektor primer dan sektor sekunder adalah dua sektor dalam perekonomian yang menggambarkan tradisional atau

modern suatu perekonomian pada suatu daerah. Pada perekonomian modern bercirikan penggunaan teknologi tinggi, mekanisasi, dan strukturalisasi. Oleh karena itu sektor sekunder dan tersier cenderung lebih mendominasi dalam perekonomian.

Pembagian sektor ekonomi dapat pula mengelompokkan pertumbuhan perekonomian. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi cenderung dihasilkan oleh sektor sekunder daripada sektor primer. Sektor sekunder dapat pula membedakan pusat pertumbuhan, seperti perkotaan yang cenderung pada industri sekunder dan pedesaan yang cenderung pada industri primer. Sektor sekunder lebih dapat menyerap tenaga kerja dibandingkan dengan sektor primer.

Peran pemerintah, pengusaha, dan investor sangat berpengaruh terhadap keberhasilan perekonomian suatu sektor. Walaupun sektor primer memberikan kontribusi yang relatif kecil dalam pertumbuhan ekonomi. Namun jika pemerintah memberikan perhatian khusus dalam hal kemudahan dan penyediaan input, maka sektor primer dapat memberikan kontribusi yang besar dalam perekonomian. Begitu pula peran pengusaha yang berinovasi dalam dunia bisnis dan industri serta tidak langsung bergantung pada impor sebagai input produksinya.

Pulau Jawa merupakan pusat dari pembangunan di Indonesia. Sehingga fasilitas publik lebih banyak tersedia pada Pulau Jawa dibandingkan dengan kawasan Indonesia lainnya dan menjadikan investor tertarik untuk menanamkan modalnya. Investor baik domestik atau asing akan memberikan pengaruh pada arah sektor ekonomi pada Pulau Jawa. Sehingga dapat diprediksikan dalam jangka

panjang Pulau Jawa akan didominasi oleh sektor sekunder atau industri-industri besar.

Berdasarkan berita resmi BPS tahun 2014 sektor ekonomi Pulau Jawa didominasi oleh sektor sekunder dan tersier. Sektor sekunder antara lain adalah sektor industri, listrik, gas, dan air bersih serta konstruksi. Sedangkan sektor tersier antara lain adalah perdagangan, pengangkutan, keuangan dan jasa-jasa. Dominasi kedua sektor tersebut di Pulau Jawa sangat berkaitan dengan keterbukaan ekonomi terhadap investor, pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi pada Pulau Jawa.

Industri pengolahan atau industri manufaktur merupakan salah satu sektor sekunder. Namun berdasarkan data yang dipublikasikan oleh BPS, secara umum jumlah industri manufaktur pada Pulau Jawa mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa perekonomian pada Pulau Jawa perlahan bergerak menuju ke sektor finansial dan jasa. Sedangkan industri manufaktur atau pengolahan yang dipercaya dapat menyerap banyak tenaga kerja kini mulai berkurang atau mungkin terjadi mekanisasi, sehingga lebih efisien dan mengurangi tenaga kerja.

Pada sektor finansial dan jasa, tingkat pendidikan dan keahlian yang dimiliki seseorang merupakan akses utama untuk masuk ke dalam sektor tersebut. Dengan demikian peran pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan taraf pendidikan masyarakat harus diperhatikan. Jika tidak, maka yang akan terjadi ketimpangan dan permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi. Terlebih lagi pada

tahun 2016 akan diberlakukannya masyarakat ekonomi asia (MEA). Sehingga persaingan dalam dunia kerja akan semakin ketat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik laju pertumbuhan investasi dalam negeri dari tahun 2009-2011 untuk penanaman modal domestik memiliki tren positif atau meningkat. Secara nasional proyek investasi terbesar adalah pada sektor perindustrian atau manufaktur, yaitu berkisar antara tiga *digit* lebih besar dibandingkan sektor investasi lainnya yang hanya dua *digit*. Hal ini sejalan dengan penanaman modal yang telah dilakukan pada investasi sektor industri lebih besar dari pada sektor lainnya.

Pulau Jawa merupakan pulau dengan proyek investasi terbanyak dibandingkan dengan wilayah Indonesia lainnya. Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur merupakan dua provinsi dengan jumlah proyek terbesar dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa. Kedua Provinsi tersebut memiliki penanaman modal terbesar dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa.

Investasi tidak hanya dilakukan oleh investor domestik saja, tetapi juga oleh investor asing. Proyek investasi yang paling diminati oleh investor asing adalah sektor industri atau manufaktur, komunikasi dan transportasi serta pergudangan. Tidak jauh berbeda dengan pola investasi domestik, investasi asing masih banyak dilakukan di Pulau Jawa. Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, merupakan provinsi yang paling diminati oleh para investor asing. Hal tersebut sejalan dengan proyek-proyek investasi yang ada pada provinsi tersebut lebih banyak dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat beberapa masalah yang diduga dapat mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan. Masalah - masalah tersebut dapat diuraikan dalam pertanyaan - pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah adanya pengaruh kepadatan penduduk terhadap ketimpangan distribusi pendapatan?
2. Apakah adanya pengaruh tingkat pendidikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan?
3. Apakah adanya pengaruh industri pengolahan (manufacturing industry) terhadap ketimpangan distribusi pendapatan?
4. Apakah adanya pengaruh investasi padat modal terhadap ketimpangan distribusi pendapatan?
5. Apakah adanya pengaruh pembangunan fasilitas publik terhadap ketimpangan distribusi pendapatan?
6. Apakah adanya pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan?
7. Apakah adanya pengaruh pendapatan perkapita terhadap ketimpangan distribusi pendapatan?

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dan karena keterbatasan peneliti dalam melakukan penelitian. Maka penelitian ini dibatasi hanya pada Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pendidikan, dan Industri Manufaktur terhadap

Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Pulau Jawa pada periode waktu 2007-2013.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka masalah dalam penelitian ini permasalahan dapat dirumuskan menjadi:

1. Apakah adanya pengaruh pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Jawa?
2. Apakah adanya pengaruh tingkat pendidikan dengan ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Jawa?
3. Apakah adanya pengaruh industri manufaktur dengan ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Jawa?

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan. Kegunaan penelitian ini secara umum dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:

1. Kegunaan teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penambahan pengetahuan baru yang aktual mengenai ketimpangan distribusi pendapatan dan faktor yang mempengaruhinya.

2. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak khususnya pemerintah atau lembaga terkait sebagai bahan kajian atau pertimbangan dalam memecahkan permasalahan ketimpangan distribusi pendapatan di pulau Jawa.